

Yogyakarta, 27 November 2025

No : 034/B/CBT/TP/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-Legalitas atas UD WOOD & SOUL

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur PT TRANsTRA PERMADA No.: 028/PB-TP/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal pembekuan Sertifikat Legalitas UD WOOD & SOUL, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, pada lampiran 3.6 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas dicabut karena Pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

Sesuai dengan perihal tersebut diatas, maka sejak terbitnya surat ini, Sertifikat Legalitas UD WOOD & SOUL, No. 509/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 27 Agustus 2023 dinyatakan statusnya DICABUT dan tidak berlaku.

Dengan dicabutnya Sertifikat Legalitas maka :

- a. UD WOOD & SOUL, tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
- b. Segala hak-hak yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK dicabut.
- c. Sertifikat Legalitas No. 509/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 27 Agustus 2023 harus dikembalikan kepada PT TRANsTRA PERMADA.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan
3. Pimpinan UD WOOD & SOUL
4. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX Mataram
5. Sekertariat Komite Akreditasi Nasional
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)